

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas berjudul “Implementasi Program Kredit Sejahtera (Prokesra) Dalam Mendorong Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Mengakses Permodalan (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo)” hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa:

1. Kesesuaian program dengan pemanfaat

Pada fokus ini kesesuaian program dengan pemanfaat ini belum berhasil diimplementasikan dengan baik, meskipun dalam program ini memiliki tujuan yang jelas, strategi dan perencanaan anggaran yang sistematis dengan melibatkan akuntan, tetapi tingkat pengetahuan pelaku UMKM terhadap Prokesra di Sidoarjo masih belum optimal dengan presentase 20-30% saja, selain itu adanya kredit lain di Sidoarjo dengan bunga yang lebih murah yakni sebesar 2% pertahunnya yang dinilai lebih murah dari pada Prokesra, UMKM juga membutuhkan dengan jangka waktu/tenor yang lebih lama, serta pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan kredit saja namun juga membutuhkan pendampingan untuk bisa lebih memajukan usahanya.

2. Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana

Pada fokus ini Implementator Prokesra sudah tepat yaitu Diskop UKM Jatim serta PT. BPR Jatim atau biasa disebut dengan Bank UMKM yang sesuai dengan bidangnya, kemudian juga terdapat audit/akuntan yang berperan untuk memeriksa kesiapan BPR dalam penyalurannya. Para pelaksana baik Diskop

UKM Jatim, Pt. BPR Jatim pusat maupun Cab. Sidoarjo telah melaksanakan tugasnya dengan baik, Keduanya sama-sama telah memahami Prokesra dan tupoksinya masing-masing dari mulai perencanaan hingga monitoring, organisasi pelaksana juga menunjukkan respon positif terhadap Prokesra sehingga selalu mendukung program agar dan tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian program dengan pelaksana telah tercapai.

3. Kesesuaian pemanfaat dengan organisasi pelaksana

Pada fokus ini kelompok sasaran prokesra telah ditentukan dengan tepat yaitu pelaku UMKM, proses pengajuan prokesra sudah dilakukan sesuai SOP dan sudah dipastikan UMKM di Sidoarjo sudah memenuhi persyaratan sebagai calon penerima manfaat. Di Sidoarjo banyak UMKM yang tidak mendapatkan Prokesra karena sudah mendapatkan pinjaman di Bank lain dan Slik yang nilainya buruk, serta terdapat NPL sebesar 0,08% yang menandakan masih adanya UMKM yang terlambat melakukan pembayaran, sehingga pada fokus ini masih belum berhasil di implementasikan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang akan peneliti sampaikan ialah sebagai berikut :

1. Agar informasi mengenai program Prokesra dapat menjangkau dan diterima secara lebih luas oleh seluruh UMKM di Kabupaten Sidoarjo, sangatlah penting untuk memperkuat kanal dan metode komunikasi yang digunakan.

Hal ini mencakup penyusunan pesan yang relevan, pemilihan media yang tepat baik offline seperti pertemuan langsung, dan penyuluhan di kecamatan, maupun online seperti media sosial, email, atau grup WhatsApp komunitas UMKM. Dengan langkah tersebut, setiap pelaku UMKM, tak terkecuali yang berada di pelosok, mampu menerima informasi dengan jelas dan lengkap sehingga dapat memanfaatkan program secara optimal, sesuai tujuan yang diinginkan.

2. Supaya UMKM di Sidoarjo tidak hanya sekadar memperoleh akses kredit dari program ini, tapi juga dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sangat dianjurkan agar pendampingan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang UMKM. Pendampingan ini dapat mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pelatihan manajemen bisnis, strategi pemasaran digital hingga pengembangan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sederhana. Dengan demikian, UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga mampu mengelola usaha mereka dengan lebih profesional dan mandiri.
3. Disarankan agar Prokesra menetapkan skema dengan bunga 0% untuk meringankan beban finansial UMKM, memperpanjang jangka waktu pinjaman guna memberikan keleluasaan dalam pengembalian, melakukan pengawasan lebih ketat setelah realisasi kredit agar bisa menurunkan presentase NPL di Sidoarjo, serta menaikkan plafon kredit hingga lebih dari Rp50 juta agar dapat mengakomodasi kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha secara lebih optimal.